

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP
MANAJEMEN LABA**

(Studi Pada Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RAHMITA WULANDARI
NIM. C2A009209

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rahmita Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : C2A009209
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA**
(Studi pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011)

Dosen Pembimbing : Drs. H. Prasetyono, M. Si

Semarang, Maret 2013
Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Prasetyono, M. Si)
NIP. 196003141986031005

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rahmita Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : C2A009209
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Manajemen
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA**
(Studi pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 April 2013

Tim Penguji

1. Drs. H. Prasetiono, M. Si. (.....)

2. Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, MM. (.....)

3. Dr. Harjum Muharam SE, ME (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **RAHMITA WULANDARI**, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA**” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, Maret 2013
Yang membuat pernyataan,

(Rahmita Wulandari)
NIM : C2A009209

ABSTRACT

This study aims to examine corporate governance mechanism, institutional ownership, independent of commissioner, size board of director, and also firm size and leverage to earning management.

The sample in this study were non- financial companies listed in IDX (Indonesia Stock Exchange) in the periode 2008-2011. The number of sample used were 103 companies listed were taken by purposive sampling. The method of analysis of this research used multi regression and single regression with SPSS 18 Program.

The results of this research show that, (1) institutional ownership had negative significant influence to earnings management, (2) independent of commissioner had positif not significant influence to earning management,(3) size board of director had negative not significant influence to earnings management, (4) leverage had negatif not significant influence to earnings management, (5) firm size had negative not significant influence to earnings management.

Key Words : Corporate governance mechanism, firm size, leverage, earnings management, financial performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme *corporate governance*, yang meliputi ; kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba. Penelitian ini juga menguji konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keuangan.

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam periode 2008-2011. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 103 perusahaan yang diambil melalui purposive sampling. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda dan regresi sederhana program SPSS 18.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, (2) komisaris independen berpengaruh positif secara tidak signifikan, (3) ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba, (4) leverage berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba, (5) ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba.

kata kunci : Mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan, leverage, manajemen laba, kinerja keuangan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan tuntunan-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi pada perusahaan non-keuangan tahun 2008-2011)”** ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Banyak pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, Msi., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. H. Prasetiono, M. Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Mustafa Kamal, MM selaku dosen wali
4. Bapak-Ibu Dosen FE yang telah memberikan ilmu tanpa batas kepada penulis.
5. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.

6. Kedua orang tua penulis, Bapak Siswanto dan Ibu Sri Arini Utami, terimakasih atas seluruh kasih sayang doa dan dukungannya selama ini. Tujuan hidup saya hanyalah ingin membahagiakan Bapak dan Ibu.
7. Kedua kakak saya Arianto Wibowo dan Irwanto Wibowo, terimakasih telah menjadi contoh buatku agar dapat menjadi yang lebih baik setiap hari.
8. Kekasihku tercinta Tribowo Kriswinarso, terimakasih atas waktu, perhatian, semangat dan kasih sayangnya. Kehadiranmu menjadikan semangat dalam diriku.
9. Teman-temanku Manajemen reguler 2 kelas A, terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Kalian adalah teman-teman yang luar biasa yang selalu memberikan inspirasi dan pengalaman.
10. Sahabat-sahabatku yang paling istimewa, Putri Cahyaningrum , Ginza Angelia, Dian cempaka, Rachma Gayatri, Gata, Adam, Gayu, Andrio, Ganesh, Adiba, Vesia, Mugi terimakasih sudah menjadi penggembira dalam hidup saya.
11. Teman – teman KKN desa Tanjung kecamatan Pakisaji Jepara, Hasna, Aci, Ipung, Rani, Ade, Ghela, Edi, Mufti, Widi, Ana, Agus yang telah memberikan banyak pengalaman selama masa KKN.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis membutuhkan saran dan kritik yang bersifat

membangun dari berbagai pihak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbarui skripsi ini maupun penelitian selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Maret 2013

Rahmita Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Keagenan(<i>Agency Theory</i>).....	16
2.1.2 <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.3 Manajemen Laba	23
2.1.4 Kepemilikan Institusional.....	26
2.1.5 Komisaris Independen.....	27
2.1.6 Dewan Direksi.....	28
2.1.7 Leverage.....	29
2.1.8 Ukuran Perusahaan.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.3 Hipotesis.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel..	41
3.1.1 Variabel Dependen.....	41
3.1.1.1 Manajemen Laba	41
3.1.2 Variabel Independen.....	43
3.1.2.1 Kepemilikan Institusional.....	43
3.1.2.2 Ukuran Komisaris Independen.....	43
3.1.2.3 Ukuran Dewan Direksi.....	44
3.1.2.4 Leverage.....	44
3.1.2.5 Ukuran Perusahaan.....	45
3.2 Populasi dan Sampel	45
3.3 Jenis dan Sumber Data	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	47

	3.5 Metode Analisis data.....	48
	3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	48
	3.5.2 Model Analisis.....	48
	3.5.3 Uji Asumsi Klasik	49
	3.5.3.1 Uji Normalitas	49
	3.5.3.2 Uji Multikolinearitas.....	49
	3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas	49
	3.5.3.4 Uji Autokorelasi.....	50
	3.5.4 Uji Hipotesis.....	51
	3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi.....	51
	3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) ...	51
	3.5.4.3 Uji Statistik (Uji t)	52
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
	4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	53
	4.2 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.....	53
	4.2.1 Statistik Deskriptif.....	53
	4.2.2 Pengukuran Manajemen Laba.....	55
	4.2.3 Analisis Data	55
	4.2.4 Uji Asumsi Klasik.....	57
	4.2.4.1 Uji Normalitas Data.....	57
	4.2.4.2 Uji Multikolinearitas.....	59
	4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	60
	4.2.4.4 Uji Autokorelasi.....	61
	4.2.5 Analisis Regresi.....	62
	4.2.5.1 Uji F.....	62
	4.2.5.2 Koefisien Determinasi (R^2).....	63
	4.2.5.3 Uji t (Uji Hipotesis).....	63
	4.3 Pembahasan.....	66
	4.3.1 Pembahasan Hasil Hipotesis Pertama.....	67
	4.3.2 Pembahasan Hasil Hipotesis Kedua.....	67
	4.3.3 Pembahasan Hasil Hipotesis Ketiga.....	68
	4.3.4 Pembahasan Hasil Hipotesis Keempat.....	69
	4.3.5 Pembahasan Hasil Hipotesis Kelima.....	70
BAB V	PENUTUP	71
	5.1 Simpulan	71
	5.2 Keterbatasan Penelitian.....	73
	5.3 Saran	73
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Good Corporate Governance di Indonesia.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Seleksi dan Pemilihan Sampel.....	46
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.2 Jenis Discretionary Accrual.....	56
Tabel 4.3 Identifikasi Outlier.....	58
Tabel 4.4 Identifikasi Outlier Kedua.....	58
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas.....	60
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi.....	62
Tabel 4.7 Uji F.....	62
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi.....	63
Tabel 4.9 Uji t.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Grafik Normal Plot.....	58
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A Sampel Perusahaan Tahun 2008-2011.....	78
LAMPIRAN B Data Sampel Penelitian Tahun 2008-2011.....	82
LAMPIRAN C Data Output SPSS Sampel Penelitian.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Era Globalisasi saat ini, negara-negara berkembang dituntut untuk menerapkan sistem yang baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance*. Dengan adanya sistem tata kelola perusahaan yang lebih baik, maka bisnis akan lebih mampu bersaing dan lebih cepat berkembang karena perusahaan lebih terstruktur dan adanya pengawasan serta monitoring untuk meminimalisir kerugian. Menurut Husein dan Malin (dalam Purwantini, 2011), faktor utama berkembangnya kebutuhan akan tata kelola perusahaan adalah karena banyaknya kebangkrutan yang terjadi di perusahaan-perusahaan ternama di dunia, baik di sektor keuangan maupun non keuangan seperti Polly Peck, BCCL, WorldCom di Amerika Serikat, HIH dan One-tel di Australia. Kejadian yang sama juga terjadi di Asia pada tahun 1997, banyaknya perusahaan yang bangkrut memicu terjadinya krisis ekonomi yang diyakini karena kegagalan sistem tata kelola perusahaan, krisis tersebut juga dialami di Indonesia yang menjadikan *Corporate Governance* sebagai sebuah isu penting dikalangan para eksekutif, konsultan korporasi, akademis dan regulator (pemerintah) di berbagai dunia (Purwantini, 2011). Banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai kegagalan mekanisme *Good Corporate Governance* :

Tabel 1.1

Kasus *Good Corporate Governance* di Indonesia

Perusahaan	Kasus
Sinar Mas Group	Melakukan pelanggaran kegagalan mengumumkan kepada publik informasi material berupa penandatanganan perjanjian penyelesaian dengan krediturnya, tidak mengumumkan laporan keuangan tahunan dan tidak menginformasikan kepada Bapepam mengenai gugutan piutang dagang dalam jumlah yang cukup material
Indomobil	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa tender penawaran saham perusahaan ini mengandung praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pemegang tender
Kimia Farma	Perusahaan diduga melakukan <i>mark up</i> laporan keuangan, yaitu menggelembungkan laba Rp. 32,668 milyar.
Lippo Bank	Menerbitkan 3 versi laporan keuangan sekaligus yang saling berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dalam media massa, dilaporkan pada Bapepam, dan kepada manajer perusahaan.

Sumber : Sulistyanto, 2008

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan dan mengintroduksir konsep *Good Corporate Governance* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank (ADB)* menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committe*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi

kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Dengan demikian, penerapan konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Sutedi, 2011)

Menurut Monks (dalam Kaihatu, 2006), *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat pada waktunya serta kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* menjadi hal yang ditekankan dalam konsep *Good Corporate Governance*. Terzaghi (2012) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara pemilik dengan pengendalian perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agent* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *principal* dengan *agen*.

Teori keagenan dari Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan atau *agency relationship* muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) menggaji individu lain (karyawan atau *agen*) untuk bertindak atas namanya, mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada *agen* atau karyawannya. Pemisahan yang terjadi antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan menimbulkan suatu konflik yang disebut dengan *agency conflict* (Ahmad dan Septriani, 2008). Biasanya ada tiga jenis konflik

keagenan yang sering terjadi, yaitu: (1) Konflik antara pemegang saham dengan manajemen, (2) Konflik antara pemegang saham dengan pemegang hutang, dan (3) Konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas (Purwantini, 2011).

Dengan berperan sebagai agen, manajemen suatu perusahaan diberi wewenang oleh pemilik (*principal*) untuk mengambil keputusan dan menjalankan serta mengurus jalannya perusahaan. Oleh karena itu manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi-informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik perusahaan. Manajemen mempunyai kewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Namun terkadang informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini yang sering disebut sebagai informasi yang tidak simetri (*information asymmetric*) (Ujiyantho, 2007). Richardson (dalam Sutedi, 2011), asimetri informasi terjadi karena antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen. Asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat memicu manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*).

Secara umum manajemen laba (*earnings management*) didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder*

yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008). Alasan mendasar timbulnya manajemen laba adalah harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan meningkat, maka dari itu banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko. Manajemen perusahaan (*agen*) merupakan pihak yang paling berkepentingan melakukan praktik manajemen laba. Tujuan utama manajemen melakukan manajemen laba adalah untuk mengelabui pemakai laporan keuangan sehingga manajemen mendapatkan keuntungan pribadi (*obtaining privat gains*). Manajemen laba dilakukan oleh manajer dengan mempercantik laporan keuangan (*Fashioning accounting reports*), yaitu mempermainkan dan mengutak-atik angka-angka dalam laporan keuangan agar terlihat lebih cantik serta memaksimalkan kesejahteraan manajer (Sulistyanto, 2008). Beberapa pihak yang dirugikan oleh praktik manajemen laba antara lain calon investor, kreditur, supplier, regulator, dan *stakeholder* lainnya.

Boediono (2005) menyatakan salah satu cara efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan tercapainya tujuan perusahaan perlu peraturan dan mekanisme pengendalian, salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance*. Pengertian dari *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/ pemilik modal/ dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika-etika (Sutedi, 2011). *Good Corporate Governance* menjadi salah satu cara untuk mengeliminasi upaya rekayasa manajemen yaitu dengan membuat peraturan tentang keharusan bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi-informasi tertentu secara wajib (*mandated disclosure*) dan sukarela (*voluntary disclosure*), upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan (Sulistyanto, 2008). Secara konseptual mekanisme *Good Corporate Governance*, yaitu upaya membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam mengelola sebuah perusahaan dapat menjadi penghambat bagi aktivitas manajemen laba. Maka dari itu, perusahaan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menurunkan tingkat manajemen labanya.

Kinerja perusahaan sebagai tolok ukur bagi para investor untuk melihat perkembangan perusahaan, membuat manajer akan melakukan berbagai cara untuk menampilkan kinerja terbaiknya, terutama dalam kondisi perekonomian yang menurun. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan dalam menilai kinerja atau tingkat kesehatan perusahaan, dengan demikian banyak kemungkinan para manajer melakukan praktik manajemen laba agar laporan keuangan terlihat baik dan memenuhi kriteria bagi investor (Sari, 2011).

Rasio *leverage* merupakan rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dengan

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal, atau dapat juga menunjukkan beberapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang (Nugroho, 2011). Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi, berpengaruh dalam melakukan praktik manajemen laba karena perusahaan terancam *default*, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya.

Laporan keuangan merupakan media yang dipakai perusahaan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh serta apa yang telah dilakukan dan dialami perusahaan itu selama satu periode tertentu, selain itu laporan keuangan juga digunakan untuk menginformasikan kondisi perusahaan pada saat tertentu sebagai akibat dari apa yang dilakukan dan dialami (Sulistyanto, 2008). Laporan keuangan juga harus mengikuti standar akuntansi keuangan bila diterbitkan untuk orang lain, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan dan masyarakat luas, sehingga memberikan keleluasaan manajer untuk memilih metode akuntansi dalam menyusun laporan keuangan (Saffudin, 2011). Oleh sebab itu, laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Terjadinya manipulasi laporan keuangan salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya penerapan *corporate governance* (Suryani, 2010). Untuk itu perlu dilakukan perbaikan agar dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance*. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Sutedi, 2011). Beberapa mekanisme *Corporate Governance*

antara lain diwujudkan dengan adanya komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi dan ukuran perusahaan.

Mekanisme *corporate governance* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya manajemen laba, salah satu indikatornya adalah pengawasan dari komisaris independen. Keberadaan dewan komisaris independen bersifat efektif dalam memonitor manajemen. Dalam memonitor manajemen akan efektif jika komisaris independen hanya sebagai komisaris independen dalam satu perusahaan sehingga tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain (Andayani, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), Bangun dan Vincent (2008) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap terjadinya manajemen laba. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan Andayani (2010), dan Subhan (2011), dimana komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Kepemilikan Institusional menjadi salah satu bentuk pelaksanaan mekanisme *Corporate Governance*. Kepemilikan institusi memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang oportunistis melalui pengawasan intensif. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) dan Veronica dan Utama (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tindakan manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008), Indriastuti (2012), dan Subhan (2011) menyatakan hasil yang

berbeda dimana kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan *corporate governance*. Dewan direksi juga mempunyai tugas untuk menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan melindungi kepentingan pemegang saham (Subhan, 2011). Namun, kebutuhan jumlah direksi yang banyak juga akan menimbulkan kerugian dalam hal komunikasi dan pada akhirnya menyebabkan permasalahan antara principal dan agen. Hasil penelitian Azlina (2010) dan Subhan (2011) menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan pada manajemen laba. Berbeda dengan hasil penelitian Iqbal dan Fachriyah (2008), Midiastuty dan Mahfoedz (2003), dan Pradipta (2011) yang menunjukkan bahwa desan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin tinggi manajemen laba.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham (Azlina, 2010). Penelitian yang dilakukan Halim dkk (2005) dan Roudotunnisa (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Veronica dan

Utama (2005) dan Dela dan Sunaryo (2010) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti mempunyai pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

Selain penerapan *corporate governance* dan ukuran perusahaan, terdapat faktor lain yang dapat menimbulkan manajemen laba oleh manajer, yaitu *leverage* / hutang. Hutang yang digunakan secara efektif dan efisien akan meningkatkan nilai perusahaan, namun apabila dilakukan dengan alasan untuk menarik perhatian para kreditur, maka justru akan memicu terjadinya praktik manajemen laba. Astuti (2004) dan Tarjo (2008) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Indriani (2010) dan Subhan (2011) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka perlu diadakan penelitian dengan variabel-variabel berupa kepemilikan institusional, ukuran komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, *leverage*, manajemen laba, dan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk membuktikan permasalahan yang muncul. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) perusahaan non keuangan merupakan taraf perusahaan yang besar dan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian negara. Persaingan pada perusahaan non-keuangan juga semakin meningkat, dengan demikian kemungkinan untuk melakukan aktivitas manajemen laba sangat besar. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan untuk

mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tersebut sudah menerapkan mekanisme *Good Corporate Governance*. Judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah **“ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA“ (STUDI PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2008-2011)**

1.2 Rumusan Masalah

Teori agensi telah memunculkan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan pihak agen sehingga antara pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan berbeda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya dapat menimbulkan manajemen laba (Arifin, 2005). Maka dari itu dibutuhkan sistem yang dapat mengatasi konflik dalam hubungan keagenan. Penerapan mekanisme *corporate governance* menjadi sistem yang dapat mengatasi konflik dalam hubungan keagenan dan juga dapat meminimalisir perilaku manajemen laba serta dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Indikator *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi, ukuran komisaris independen, kepemilikan konstitusional, ukuran direksi, ukuran perusahaan. Selain itu , leverage juga dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba.

Penelitian ini dimotivasi oleh adanya hasil yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Subhan (2011). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), menunjukkan

bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2010). Hasil penelitian Widyaningdyah (2001) menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan pada manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2011). Sunaryo (2010) menemukan bukti adanya pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba namun bertentangan dengan hasil penelitian Halim dkk (2005). Subhan (2011) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba namun berbeda hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Azlina (2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba?
3. Bagaimana pengaruh ukuran direksi terhadap manajemen laba?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba?
5. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertolak pada latar belakang permasalahan di atas maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh ukuran komisaris independen terhadap manajemen laba

2. Menganalisis pengaruh ukuran kepemilikan institusional terhadap manajemen laba
3. Menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba
4. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba
5. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi para pengguna informasi (pemegang saham, manajer, kreditur, karyawan) untuk memahami mekanisme *corporate governance* dalam memberikan suatu keputusan yang tepat dan bijaksana
2. Bagi bidang akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah terjadinya manajemen laba dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menjelaskan landasan teori *corporate governance* dan manajemen laba, kajian-kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.
- BAB III Metode Penelitian menjelaskan mengenai variabel–variabel penelitian (variabel independen dan variabel dependen) dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan untuk penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis untuk penelitian
- BAB IV Hasil dan Analisis menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.
- BAB V Penutup berisi kesimpulan dari analisis atau pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian serupa di masa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam hal ini pemegang saham sebagai *principal* mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang berlaku dalam hubungan tersebut (Terzaghi, 2012). Hubungan antara agen dan *principal* (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agent melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh *principal* melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.

Eisenhardt (dalam Sam'ani, 2008) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia tersebut maka seorang manajer akan cenderung bertindak oportunistik, yaitu lebih

mengutamakan kepentingan pribadinya dan hal tersebut memicu terjadinya konflik keagenan. Teori ini memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Gerianta, 2009). Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat meminimumkan konflik keagenan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa seorang manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi-informasi internal dan prospek perusahaan pada waktu kedepan dibandingkan pemilik (pemegang saham), karena pemilik (pemegang saham) tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen, maka pemilik (pemegang saham) tidak pernah dapat mengetahui dengan pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Indriyani, 2010). Oleh karena itu sebagai seorang manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara dewan komisaris, manajemen perusahaan, dan para pemegang saham. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang berdasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Corporate Governance

Corporate Governance Pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dengan definisi sebagai berikut, “*A set a rules that define the relationship between shareholder, manager, creditor, government, employee*

and other internal and external stakeholder in respect to the right and responsibility”.

International Good Practice Guidance (IFAC 2009) Corporate governance didefinisikan sebagai serangkaian praktik dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dewan (komisaris) dan eksekutif manajemen dengan tujuan memberi arahan–arahan yang strategis, memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai, memastikan bahwa semua resiko dapat dikelola dengan benar, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara bertanggungjawab. Shleifer dan Vishny (1997) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu cara atau mekanisme yang digunakan untuk menyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mengartikan *Corporate Governance* adalah system yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perusahaan. *Corporate Governance* berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berperan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham.

The Indonesia Institute for Corporate Governance atau *IIGC* (dalam Surifah, 2011) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan mempunyai tujuan utama

yaitu meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang , walaupun demikian harus tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham , pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Sutedi, 2011). Apabila mekanisme *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik (Brown and Caylor, 2004).

Pada tahun 1999 (direvisi pada tahun 2004), *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* telah mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masing

bilamana diperlukan. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh OECD (2004) yaitu:

- (1) Memastikan dasar bagi kerangka *corporate governance* yang efektif (*Ensuring The Basis for an Effective Corporate governance Framework*).

Kerangka *corporate governance* harus meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas mengartikulasikan pembagian kewajiban antara pengawas, regulator dan otoritas pelaksanaan yang berbeda.

- (2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci (*The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions*)

Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham.

- (3) Persamaan perlakuan bagi pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

- (4) Peranan *shareholder* dalam *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in Corporate governance*)

Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak stakeholder yang ditetapkan oleh hukum atau melalui *mutual agreement* dan mendorong

kerjasama aktif antara korporat dan stakeholder dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan perusahaan yang memiliki *sustainable*.

(5) Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas semua hal yang material menyangkut korporat, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

(6) Kewajiban dewan (*The Responsibilities of the Board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* ini diharapkan dapat dijadikan titik acuan bagi para pemerintah dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) memaparkan azas-azas GCG sebagai berikut :

(1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

(2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

(3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

(4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

(5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba menurut Fitcher dan Roszenrwig (dalam Vincent dan Bangun, 2008) adalah tindakan manajer yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan dagang menaikkan atau menurunkan profitabilitas perusahaan untuk jangka panjang. Sedangkan menurut Merchant dan Rockness (dalam Palestin, 2009) manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu tindakan manajemen yang mempengaruhi laba yang dilaporkan dan memberikan manfaat ekonomi yang keliru kepada perusahaan, sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan sangat mengganggu bahkan membahayakan perusahaan. Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba:

“purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain”

Dari definisi tersebut menyebutkan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Alat untuk mengukur besarnya manajemen laba adalah dengan menghitung *discretionary accruals* yang merupakan komponen akrual hasil rekayasa

manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standart akuntansi (Sulistyanto, 2008). Model Jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan model yang banyak digunakan dalam penelitian karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling baik (Sulistyanto, 2008).

Teori akuntansi positif menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis, Watts and Zimmermann (dalam Sulistyanto, 2008) menyatakan bahwa motivasi yang mendorong melakukan manajemen laba ada tiga :

a. Hipotesis program bonus (*bonus plan hypothesis*),

Hipotesis Program Bonus (*Bonus Plan Hypotesis*). Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajer pada sebuah perusahaan yang menerapkan program bonus, lebih cenderung untuk menggunakan metode atau prosedur-prosedur akuntansi yang akan menaikkan laba saat ini dengan memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Gerianta, 2009). Dalam bonus atau kompensasi manajerial, perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2008)

Selain itu Healy (dalam Gumanti, 2000) mengemukakan suatu bukti bahwa terdapat suatu hubungan yang kuat antara akrual dan adanya dorongan-dorongan tertentu yang mempengaruhi manajer untuk mengatur jumlah pendapatan yang dilaporkan, khususnya manajer akan memilih akrual yang menurunkan pendapatan pada saat pola bonus berada di bawah atau di atas batasan yang diikat,

dan memilih akrual yang menaikkan pendapatan pada saat batasan tersebut tidak diikat.

b. Hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*).

Dalam konteks perjanjian hutang manajer akan mengelola dan mengatur labannya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya (Sulistyanto, 2008). Belkaoui (dalam Ujiantho, 2007) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio hutang suatu perusahaan maka semakin dekat perusahaan tersebut dengan permasalahan-permasalahan dalam perjanjian hutang dan semakin besar pula probabilitas pelanggaran perjanjian, oleh karena itu dapat semakin memungkinkan seorang manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income*.

c. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypotheses*).

Biaya politik adalah suatu rekayasa laba dengan tujuan untuk meminimalkan risiko politik. Scott (dalam Saputro, 2004) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung untuk melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen. Menurut Watts dan Zimmerman (dalam Saputro, 2004) Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh

pemsahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan lain sebagainya.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun Shien, dkk (dalam Sekaredi, 2011). Sedangkan menurut Jensen dan Meckling (dalam Saffudin, 2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif (Boediono, 2005). Dengan adanya aktivasi monitoring institusi maka mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost* (Widjaja dan Kasenda, 2008).

2.1.5 Komisaris Independen

Pengertian komisaris menurut Emirzon (2006) adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol jalannya perusahaan yang dipimpin oleh dewan direksi. Selanjutnya Emirzon (2006) menjelaskan bahwa pembentukan Komisaris Independen ini didasarkan oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka. Fama dan Jensen (dalam Pratiwi, 2010) menyatakan bahwa *non executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan antara manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Anggota dari Komisaris Independen tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat. Karena Komisaris Independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen.

Ukuran komisaris independen sangat diperhitungkan. Seperti pada ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan, yang menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) perusahaan tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali (Emirzon, 2006).

2.1.6 Dewan Direksi

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Hermalin dan Weisbach (dalam Pratiwi, 2012) mengatakan bahwa jumlah anggota dewan direktur umumnya berhubungan dengan implikasi dari kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direktur.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu sebagai berikut (Solihin, 2009)

- a. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan; serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
- c. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan keinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
- e. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.7 Leverage

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham maupun investor (Sudarmaji dan Sularto, 2007). *Leverage* dibagi menjadi dua yaitu *leverage* operasi (*operating leverage*) dan *leverage* keuangan (*financial leverage*) (Van Horne dan Wachowicz, 2005). *Leverage* Operasi menunjukkan seberapa besar biaya tetap yang digunakan dalam operasi perusahaan sedangkan *Leverage* keuangan menunjukkan seberapa besar kemampuan dalam membayar hutang dengan modal yang dimilikinya.

Watts and Zimmerman (dalam Astuti, 2005) menjelaskan bahwa dalam hipotesis *debt covenant*, motivasi *covenant* disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial. Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktiva akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Rasio untuk mengukur leverage yaitu dengan rasio total utang terhadap total aset (Hanafi, 2004).

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat digolongkan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Karena semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu, ketiga variabel tersebut digunakan untuk menentukan ukuran

perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut (Sudarmaji dan Sularto, 2007).

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*) (Suwito dan Herawati, 2005). Ukuran suatu perusahaan diukur dari natural logaritma nilai pasar saham akhir tahun (Siregar dan Utama, 2005)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang meneliti tentang hubungan antara mekanisme *good corporate governance* terhadap praktek manajemen laba ini, merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Agnes Utari Widyaningdyah (2001)	Analisis faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap <i>earnings management</i> pada Perusahaan <i>go public</i> di Indonesia	Dewan direksi, Leverage	1. Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
2.	Dewi Saptantinah Puji Astuti (2004)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba di Seputar <i>Right Issue</i>	Kepemilikan institusional dan <i>Leverage</i>	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

				2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba
3.	Julia Halim ,dkk (2005)	Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang termasuk dalam indeks lq-45	Leverage, Ukuran Perusahaan	1. Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
4.	Gideon SB. Boediono (2005)	Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur	Kepemilikan Institusional, manajemen laba	1. kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan
5.	Theresia Dwi Hastuti (2005)	Hubungan antara good corporate governance dan struktur Kepemilikan dengan kinerja keuangan (studi kasus pada perusahaan yang listing di bursa efek jakarta)	Manajemen laba	1. Manajemen laba tidak mempunyai hubungan yg signifikan terhadap kinerja perusahaan.
6.	Sylvia Veronica dan Siddharta Utama (2006)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktik <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earning Management</i>)	Kepemilikan institusional, Ukuran perusahaan	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

7.	Ujiyantho dan Pramuka (2007)	Mekanisme <i>corporate governance</i> , manajemen laba Dan kinerja keuangan (studi pada perusahaan go publik sektor manufaktur)	Kepemilikan institusional, Manajemen laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 2. Manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan
8.	Nurainun Bangun dan Vincent (2008)	Analisis Hubungan Komponen <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kepemilikan Institusional, komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba 2. Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba
9.	Syaiful Iqbal dan Nurul Fachriyah (2008)	<i>Corporate Governance</i> Sebagai Alat Pereda Praktik Manajemen Laba (<i>earnings management</i>)	Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh secara tidak signifikan terhadap manajemen laba
10.	Werner R. Murhadi (2009)	Studi Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Praktik <i>Earnings Management</i> pada Perusahaan Terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia	Komisaris Independen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris independen berhubungan negatif terhadap praktik <i>earning management</i>
11.	Nur Azlina (2010)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di BEI)	Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan, Leverage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

				3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
12.	Bayu Fatma Widiatmaja (2010)	Pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensi Manajemen laba Terhadap Kinerja Keuangan (studi pada perusahaan manufaktur tahun 2006-2008)	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3. Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
13.	Nurika Restuningdiah (2010)	Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit, <i>Risk Management Committee</i> Terhadap Manajemen Laba	Komisaris Independen	komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba
14.	Subhan (2011)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> dan <i>Leverage</i> keuangan terhadap manajemen laba Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Kepemilikan Institusi, Komisaris Independen, Dewan Direksi, <i>Leverage</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba 2. Komposisi komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba 3. Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba 4. <i>Leverage</i> keuangan

				berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba
15.	Achmad Zakki Saffudin (2011)	Analisis pengaruh kepemilikan Institusional, kualitas audit, ukuran Perusahaan, dan <i>leverage</i> terhadap Praktik manajemen laba dan Konsekuensi manajemen laba Terhadap kinerja keuangan (studi pada perusahaan yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic Index</i> periode 2005-2009)	Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 4. Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non institusional (Herawati, 2008). Menurut Bushee (dalam Boediono, 2005) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens.

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara tepat dan profesional terhadap perkembangan investasi yang ada pada perusahaan. Dengan

adanya tingkat pengendalian terhadap manajemen yang sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Herawati, 2008). Menurut penelitian Tarjo (2008) kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, penelitian ini mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Subhan (2011) dan Indriastuti (2012).

Pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas meminta jajaran manajer untuk meminimalisasi manajemen laba karena jika pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas meminta manajer untuk melakukan rekayasa laba yang menguntungkan pemegang saham mayoritas dan manajemen, maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga saham perusahaan yang justru akan merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri (Tarjo, 2008)

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.2 Dewan Komisaris Independen dan Manajemen Laba

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, yang secara umum bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih efektif, sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba. Fama dan Jensen (dalam Andayani, 2010) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.

Penelitian Subhan (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi komposisi komisaris independen maka akan menurunkan manajemen laba, sehingga keberadaan komisaris independen dapat mengurangi penyelewengan manajemen dan dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Hasil yang sama dikemukakan oleh Nurika (2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba, hal ini memiliki makna bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen memiliki kemungkinan untuk melakukan manajemen laba maupun tidak melakukan manajemen laba, karena dalam suatu perusahaan dewan komisaris yang lebih berpengaruh dalam praktik manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Nasser (2008) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dengan demikian keberadaan komisaris independen dalam perusahaan mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang baik dalam upaya mengurangi praktek manajemen laba.

Dengan adanya pengawasan yang efektif dari komisaris independen maka akan mengurangi praktik manajemen laba dan lebih fokus untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

Dewan direksi mempunyai peran dan tanggung jawab yang penting dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka panjang. Ukuran dewan direksi juga sebagai salah satu komponen *good corporate governance* yang sangat berperan penting dalam mengatasi manajemen laba. Keradaan dewan direksi tersebut sebagai mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan (Subhan, 2011).

Dengan adanya kebutuhan yang besar akan jumlah dewan direksi mengakibatkan munculnya permasalahan antara pihak principal dengan agent, karena perusahaan dengan jumlah dewan direksi yang besar tidak dapat melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibanding dengan perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi yang lebih kecil (Wardhani, 2007)

Ukuran direksi yang besar mengakibatkan proses pengawasan kurang efektif dan dapat meningkatkan praktek manajemen laba oleh manajemen. Apabila jumlah dewan direksi sedikit, maka praktik manajemen laba dapat dikurangi karena komunikasi dan koordinasi pada ukuran dewan direksi yang kecil dalam aktivitas tersebut lebih efektif dibandingkan dengan ukuran direksi yang besar sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Purwandari, 2011).

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3.4 Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan hutang. Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen harus dapat lebih meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetap dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. *Leverage* yang tinggi akan berpengaruh dengan nilai pembiayaan yang juga tinggi dengan maksud untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang, dengan mempertahankan kinerja perusahaan tersebut, diharapkan kreditur juga akan tetap memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan (Subhan, 2011)

Hasil penelitian Astuti (2004) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba, karena apabila suatu perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan manajemen laba sangat besar, dan perusahaan memiliki kewajiban yang lebih besar dalam pengungkapan terhadap publik. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Subhan (2011) menunjukkan bahwa *Leverage* keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah pengalaman dan berkembangnya suatu perusahaan, dengan demikian dapat mengetahui kemampuan dan tingkat resiko perusahaan dalam mengelola investasi yang diberikan para pemegang saham.

Menurut penelitian Handayani (2009) ukuran perusahaan baik perusahaan besar, sedang maupun kecil tidak terbukti melakukan manajemen laba melalui mekanisme pelaporan laba positif, baik untuk menghindari earnings losses maupun earnings decreases. Selanjutnya Menurut veronica dan Utama (2005) ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada manajemen laba, karena pada perusahaan kecil pengawasan yang dilakukan oleh pihak regulator semakin efektif, sedangkan pada perusahaan besar cenderung lebih diperhatikan oleh pihak luar dan investor sehingga mengurangi praktik manajemen laba.

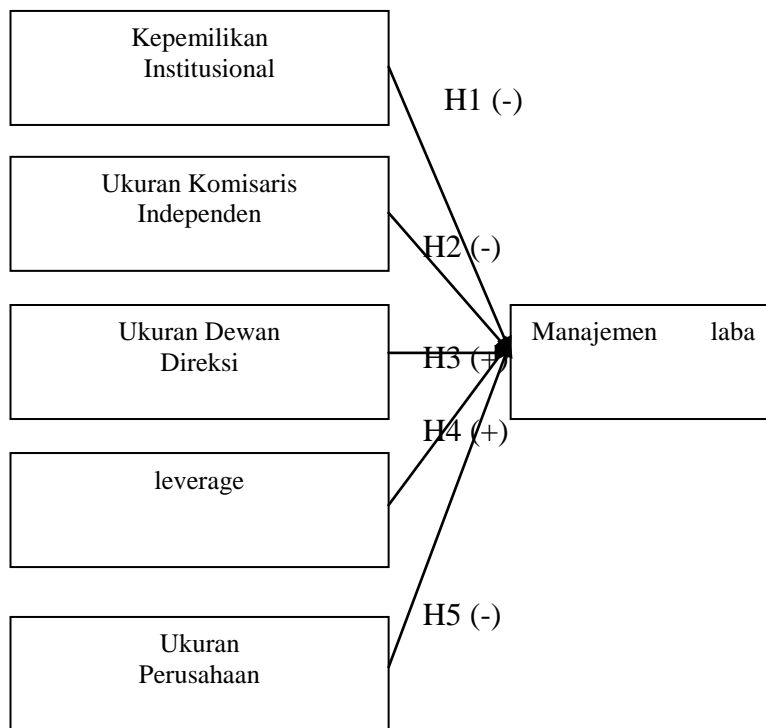
Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.4 Kerangka Pemikiran

Mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan serta leverage yang diharapkan dapat meningkatkan proses pengawasan terhadap manajemen sehingga mencegah terjadinya praktik manajemen laba yang dapat berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan

Gambar 2.1
Kerangka Pemiikiran



(Sumber : Pengembangan dari berbagai sumber)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan kinerja keuangan. Teori keagenan telah memunculkan sebuah konflik keagenan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik keagenan ini dapat mengakibatkan sifat manajemen melaporkan laba secara oportunistik untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Perilaku manajemen seperti ini merupakan akibat lemahnya pengawasan terhadap perilaku manajemen. *corporate governance*, merupakan salah satu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi praktik manajemen laba yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

3.1.1.1 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Dechow *et al.* (dalam Ujiantho dan Pramuka, 2007) menyebutkan bahwa penggunaan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* karena

model ini dianggap lebih baik di antara model lain untuk mengukur manajemen laba.

$$TAC = Nit - CFOit$$

Nilai *total accrual* (TA) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai berikut:

$$TAit/Ait-1 = \beta_1 (1 / Ait-1) + \beta_2 (\Delta Revt / Ait-1) + \beta_3 (PPEt / Ait-1) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai *non discretionary accruals* (NDA) dapat dihitung dengan rumus :

$$NDAit = \beta_1 (1 / Ait-1) + \beta_2 (\Delta Revt / Ait-1 - \Delta Rect / Ait-1) + \beta_3 (PPEt / Ait-1)$$

Selanjutnya *discretionary accrual* (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DAit = TAit / Ait-1 - NDAit$$

Keterangan:

DAit = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

NDAit = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode ke t

TAit = Total akrual perusahaan i pada periode ke t

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1

$\Delta Revt$ = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t

PPEt = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t

$\Delta Rect$ = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t

e = error

(Sumber : Ujiyantho dan Pramuka, 2007)

3.1.2 Variable Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi dan leverage.

3.1.2.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. pemilik memiliki kewenangan yang besar untuk memilih siapa-siapa yang akan duduk dalam manajemen yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan bank tersebut ke depan. Dalam penelitian ini Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar di pasar saham:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham beredar di pasar}}$$

(Sumber : Gideon, 2005)

3.1.2.2 Ukuran Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan dengan manajemen perusahaan sehingga dengan adanya komisaris independen, fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap direksi diharapkan menjadi dapat lebih objektif dan seksama. Ukuran dewan komisaris independen diukur dengan :

$$Ukuran\ Komisaris\ Independen = \sum \frac{Anggota\ Dewan}{Komisaris\ Independen}$$

(Sumber: Sam'ani, 2008)

3.1.2.3 Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan. Keradaan dewan direksi tersebut bertugas sebagai mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan.

Maka ukuran dewan direksi diukur dengan :

$$Ukuran\ Dewan\ Direksi = \sum \frac{Anggota\ Dewan}{Direksi}$$

(Sumber : Subhan, 2011)

3.1.2.4 Leverage

Rasio leverage (*leverage ratios*) mengukur sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Semakin tinggi rasio leverage maka semakin banyak aktiva yang didanai hutang oleh pihak kreditor, sehingga menunjukkan resiko perusahaan dalam pelunasannya, hal ini dapat memicu terjadinya praktik manajemen laba. Leverage diukur dengan menggunakan rasio total utang terhadap total aset.

$$Leverage = \frac{Utang}{Aktiva}$$

Keterangan :

Leverage = Rasio utang terhadap aktiva

Utang = total utang

Aktiva = total aktiva

(Sumber : Hanafi, 2004)

3.1.2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di ukur dengan logaritma natural dari besarnya kapitalisasi pasar perusahaan, karena besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak (Siregar dan Utama, 2008)

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Kapitalisasi pasar}$$

(Sumber : Siregar dan Utama, 2008)

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Non-Keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2011 yang berjumlah 363 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria yaitu :

1. Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2009
2. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara lengkap untuk periode 31 Desember 2008-2011 dalam Bursa Efek Indonesia.

3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara lengkap untuk periode 31 Desember 2008-2011 dalam *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*
4. Memiliki data lengkap mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi, ukuran perusahaan dan *leverage*
5. Selama periode pengamatan, perusahaan tidak mengalami kerugian.
6. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam bentuk rupiah

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 103 perusahaan dengan periode pengamatan masing-masing perusahaan selama 4 tahun sehingga pada penelitian ini terdapat 412 poin observasi.

Tabel 3.1

Seleksi dan Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2009	363
Tidak Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) secara lengkap untuk periode 31 Desember 2008-2011 dalam Bursa Efek Indonesia.	(56)
Tidak Mempublikasikan laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) secara lengkap untuk periode 31 Desember 2008-2011 dalam <i>Indonesia Capital Market Directory (ICMD)</i>	(28)

Tidak Memiliki data lengkap sesuai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian	(18)
Perusahaan yang mengalami kerugian	(152)
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak dalam bentuk rupiah	(6)
Perusahaan yang terpilih menjadi sampel	103

Sumber : ICMD 2011 dan IDX 2011

Dalam penelitian ini jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 103 perusahaan non keuangan. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ditunjukkan pada lampiran.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008–2011. Data tersebut diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), website IDX (*Indonesia Stock Exchange*), dan Pojok BEI Universitas Diponegoro.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan non-keuangan tahun 2008-2011 yang bersumber dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) dan website IDX (*Indonesia Stock Exchange*). Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif untuk mengetahui gambaran mengenai standar deviasi, rata-rata, minimum, maksimum dan variabel-variabel yang diteliti. Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.5.2 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Sebelumnya, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang digunakan adalah normal dan tidak mengandung gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2004)

Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan model untuk menghitung manajemen laba, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$$\text{Model 1 ML} = \beta_0 + \beta_1 \text{Inst} + \beta_2 \text{Komin} + \beta_3 \text{Komdir} + \beta_4 \text{LR} + \beta_5 \text{SIZE} + e$$

Keterangan:

ML	= Manajemen Laba
Inst	= Kepemilikan Institusional
Komin	= Komisaris Independen
Komdir	= Dewan Direksi
SIZE	= Ukuran Perusahaan
LR	= <i>Leverage</i>

(Sumber : Pengembangan dari berbagai sumber)

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data sampel. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan grafik histogram dan grafik *normal probability plot*.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan beberapa cara salah satunya dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen (Gozali, 2005). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Dan sebaliknya jika *tolerance* $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk mengetahuinya digunakan grafik *scatter plot*, yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik (Ghozali, 2005). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastitas adalah dengan menggunakan grafik *Scatterplot* antara

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan lima persen dan grafik *scatterplot*, titik-titik menyebar di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas (Ghozali, 2005). Jika terdapat pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi (Ghozali, 2005). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dapat diketahui melalui uji *Durbin Watson statistic*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi, sebagai berikut :

- a. Jika $0 < d < dL$, maka tidak ada autokorelasi positif, hipotesisi di tolak.
- b. Jika $dL \leq d \leq dU$, maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan / tidak dapat disimpulkan.
- c. Jika $4-dL < d < 4$, maka tidak ada autokorelasi negatif, hipotesis ditolak.
- d. Jika $4-dU < d < 4-dL$, maka tidak ada autokorelasi negatif, tidak dapat disimpulkan.

- e. Jika $dU < d < 4-dU$, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2005). Nilai R^2 berkisar antara 0-1%, dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik. Selanjutya menurut Ghozali (2005) kelemahan pada uji R^2 adalah bias terhadap jumlah independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai R^2 akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, sehingga disarankan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Ghozali (2005). Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan nilai signifikansi 0,05. Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau probabilitas $<$ nilai signifikan ($\text{Sig} \leq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- b. Bila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ nilai signifikan ($Sig \geq 0,05$), maka hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Ghozali (2005) menyatakan, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bila $t_{hitung} >$ dari t tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($Sig < 0,05$), maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Bila $t_{hitung} <$ dari t tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($Sig > 0,05$) maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.